

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dinamis di mana pluralitas politik berkembang pesat, yang dicontohkan oleh berkembangnya beragam partai dan organisasi politik yang didirikan secara bebas oleh warga negara. Partai-partai ini, masing-masing dipandu oleh ideologi, visi, dan misi yang unik, membentuk landasan demokrasi elektoral kita. Partisipasi aktif mereka dalam siklus pemilihan umum lima tahunan memastikan representasi dan pemerintahan yang dinamis melalui proses demokrasi yang menentukan posisi kepemimpinan politik kunci. Salah satu fungsi partai politik adalah menyelenggarakan pendidikan politik bagi para kadernya agar memperkuat pemahaman mengenai peran mereka dalam menyusun strategi sebagai upaya mengambil langkah yang tepat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang bermanfaat ketika memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 27 dijelaskan bahwa keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu merupakan himpunan mandiri warga negara yang berperan menyiapkan calon-calon serta kontestan pemilu. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mendefinisikan lembaga-lembaga ini sebagai organisasi nasional sukarela yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang bersatu karena aspirasi bersama. Tujuan mulia mereka adalah untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggota mereka, masyarakat luas, dan bangsa itu sendiri, sambil tetap teguh menjunjung tinggi

persatuan Republik Indonesia di bawah prinsip-prinsip suci Pancasila dan UUD 1945. (Yuliamaryam 2018).

Pemilu bersejarah 7 Juli 1999, yang menandai transisi Indonesia ke era pasca-reformasi, menyaksikan kebangkitan politik yang luar biasa dengan munculnya banyak partai. Kebangkitan demokrasi yang dinamis ini sangat kontras dengan periode Orde Baru yang represif, di mana partisipasi politik hanya terbatas pada dua partai resmi (PDI dan PPP) bersama dengan kelompok fungsional Golkar. Pemilu 1999 secara dramatis mengubah lanskap politik, dengan 26 partai terdaftar yang mengesankan - campuran beragam kekuatan politik yang mapan dan suara-suara baru - bersaing untuk mendapatkan mandat negara.

Partai politik adalah kelompok yang terdiri dari warga negara Indonesia yang bersatu karena memiliki harapan dan tujuan yang sama. Mereka bekerja untuk melindungi kepentingan anggotanya, masyarakat, negara, dan Indonesia secara keseluruhan. Mereka mengikuti aturan Pancasila dan Konstitusi Indonesia 1945. Partai politik menjalankan sejumlah fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di antaranya:

Memberikan pendidikan politik kepada anggota serta masyarakat umum agar menjadi warga negara Indonesia yang memahami hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- a. Menciptakan suasana yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat;
- b. Menerima, mengumpulkan, serta menyalurkan aspirasi politik masyarakat guna merancang dan menetapkan kebijakan negara;
- c. Mendorong partisipasi politik warga negara Indonesia;

- d. Melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui tata cara demokrasi dengan mempertimbangkan prinsip dan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya partai politik juga dijelaskan secara umum memiliki empat fungsi yaitu:

- a. Partai politik sebagai sarana dan komunikasi politik
- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
- c. Partai politik sebagai sarana recruitment
- d. Dan partai politik sebagai sarana pengatur politik (Ferdianto, 2016)

Peran krusial partai politik sebagai penghubung dalam menyampaikan pembinaan politik kepada seluruh anggota partai dan masyarakat tampak dari aktivitas maupun inisiatif yang mereka jalankan, kini banyak partai yang muncul hanya ketika mendekati massa pemilu. Pada kondisi yang seharusnya, jauh sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung, partai politik telah menjalankan perannya dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi para kader sebagai upaya memperluas kualitas pemahaman politik mereka secara berkesinambungan melalui pelaksanaan pendidikan politik yang konsisten.

Peran besar yang diemban partai politik dalam memberikan pendidikan politik/pembinaan politik kepada kader dan masyarakat sangat menentukan, sebab tanpa arahan politik yang memadai dapat memicu terbentuknya pola sikap kader dan strategi yang keliru dalam memahami dinamika politik maupun tujuan partai. Bila kader tidak memiliki bekal pengetahuan politik yang cukup, muncul kekhawatiran bahwa para kader yang terbentuk tidak dapat mengimbangi persaingan di kontestasi politik mendatang. Apabila mencermati penyelenggaraan

pemilu pada periode sebelumnya, terlihat bahwa sejumlah kader berusia muda memperoleh perhatian dan dukungan yang cukup besar dari para pemilih dalam persaingan politik. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya tingkat pemahaman politik yang dimiliki masyarakat, sehingga penyelenggaraan pendidikan politik menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara maksimal oleh setiap partai politik.

Partai politik pertama kali muncul di Eropa Barat. Awalnya, di negara-negara seperti Inggris dan Prancis, kelompok-kelompok politik sebagian besar bekerja di dalam parlemen. Partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki ide dan tujuan yang sama dan ingin bekerja sama. Mereka terbentuk untuk mendapatkan kekuasaan dan memegang jabatan penting di pemerintahan. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah penghubung utama antara berbagai kepercayaan dalam masyarakat dan pemerintah. Di antara berbagai fungsi yang dimiliki partai politik, sosialisasi politik merupakan peran yang tidak dapat diabaikan. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemanfaatan media massa, penyelenggaraan diskusi publik, maupun kegiatan sosialisasi yang ditujukan secara khusus kepada kader partai. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, partai politik berupaya membangun citra sebagai organisasi yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Budiardjo, 2008).

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang tergolong besar, didirikan pada tahun 1964 oleh ketua sekber Golkar pertama Brigadir Jenderal Djuhartono. Dimana pengaruhnya mencapai titik tertinggi pada masa pemerintahan orde baru.

Selama tiga dekade, partai ini terus berada di posisi puncak kekuasaan dengan selalu menempatkan kadernya sebagai Presiden serta menguasai sebagian besar kursi di lembaga legislatif. Setelah Pemilu, Golkar justru menghadapi berbagai pembaruan yang membuatnya beralih menjadi partai politik yang lebih modern, inklusif, dan demokratis sesuai semangat reformasi, demi mempertahankan keberadaannya sebagai kekuatan politik besar pasca reformasi 1998, meskipun sempat mendapat citra negatif dari masyarakat (Djuyandi et al., 2024).

Tabel 1. 1 Sayap Partai Golkar Dan Model Kaderisasi

No	Sayap Partai Golkar	Model Kaderisasi
1	Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)	-Orientama (Orientasi Tatap Muka) -Pelatihan Kepemimpinan -Sinkronasi Karya Kekaryaan
2	Sentral Organisasi Karyawan Indonesia (SOKSI)	Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) -Tingkat Dasar -Tingkat Madya -Tingkat Andalan
3	Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)	-Rekrutmen Lintas Sektor -Pelatihan Dan Pendidikan Karakter -Penugasan Fungsionaris
4	Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)	-Rekrutmen Kader -Pendidikan Politik & Diklat -Penugasan Lapangan -Evaluasi & Regenerasi
5	Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)	-Latihan Pendidikan & Kaderisasi (LPK) -Penjejanan & Penugasan Kader -Konsolidasi & Aktualisasi
6	Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)	-Rekrutmen Terpadu (<i>One Gate Policy</i>) -Pendidikan Politik & Kapasitas -Advokasi & Aksi Sosial -Penjenjangan & Penugasan
7	Himpunan Wanita Karya (HWK)	-Rekrutmen Kader -Pelatihan Kepemimpinan -Konsolidasi Struktural -Advokasi Sosial & Kesejahteraan
8	Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)	-Perekrutan & Identifikasi -Pelatihan & Pendidikan Dakwah -Sinergi Kelembagaan -Pengabdian Masyarakat

Sumber : Olah Data Penulis

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjadi landasan konstitusional bagi Partai Golongan Karya (Golkar). Peraturan pemerintah ini menetapkan kewajiban untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik. Dalam Bab I, Pasal 1, ayat 4, dan Bab II, Pasal 2, ayat 4, huruf h, terdapat aturan-aturan penting mengenai partai politik. Bab V, Pasal 11, ayat (1), huruf a, menjelaskan bahwa partai politik membantu mendidik masyarakat tentang politik. Mereka ingin membantu warga negara Indonesia mempelajari hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, negara, dan (Akmal, 2018)

Kabupaten Langkat turut memiliki lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi salah satu tujuan utama partai-partai politik dalam pemilihan legislatif. Jumlah kursi yang diperebutkan di DPRD Kabupaten Langkat sebanyak 50 kursi. Berikut disajikan capaian atau jumlah kursi yang berhasil diperoleh Partai Golkar pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif selama 2 (dua) periode terakhir.

Tabel 1. 2 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Di DPRD Kabupaten Langkat

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2019-2024	2024-2029
 Golkar	10	10
Jumlah Anggota DPRD Langkat	50	50
Jumlah Partai	10	10

Sumber : KPU Kabupaten Langkat

Tabel 1. 3 Jumlah Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Langkat

No	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	393.930	393.551	781.481

Sumber : KPU Langkat

Persentase keikutsertaan masyarakat Kabupaten Langkat dalam menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024 mencapai 80,46% (persen). Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Dian Taufik Ramadhan, dalam kegiatan bertajuk “Pelayanan Pers” yang dihadiri para wartawan Kabupaten Langkat dan berlangsung di Aula Pegnasos (Rambe, 2024).

Tabel 1. 4 Perolehan Suara Partai Golkar Di Kabupaten Langkat Periode 2019-2024

No	Suara	Kursi	Periode
1	101.936	10	2019-2024
2	100.422	10	2024-2029

Sumber : (<https://golkarpedia.com/ini-daftar-50-caleg-terpilih-dprd-kabupaten-langkat-2024-2029-partai-golkar-terbanyak/>)

Berdasarkan data perolehan kursi DPRD Kabupaten Langkat tersebut, terlihat bahwa Partai Golkar termasuk salah satu partai politik yang memperoleh jumlah kursi terbanyak di lembaga legislatif. Sepanjang dinamika politik di Kabupaten Langkat, perolehan kursi Partai Golkar menunjukkan kondisi yang relatif konsisten dan tetap bertahan dengan capaian tertinggi pada Pemilihan Legislatif periode 2019 maupun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Partai Golkar memiliki basis dukungan masyarakat yang cukup kuat di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pujiyanto SE selaku Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK). Beliau mengatakan bahwa salah satu kunci utama dalam kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2 periode berturut turut di Kabupaten Langkat adalah dengan melaksanakan Pendidikan Politik. Pendidikan politik yang dilaksanakan DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat memiliki fungsi sosialisasi politik, di mana kader dibekali pengetahuan mengenai bagaimana partai berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta mendukung jalanya pemerintahan. . Selain itu, materi terkait peran partai dalam melaksanakan kebijakan publik menunjukkan fungsi edukatif pendidikan politik dalam meningkatkan kapasitas kader. Beliau menambahkan Pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun juga memperlihatkan adanya fungsi pembinaan dan penguatan kader secara berkelanjutan

Berdasarkan hasil telaah penulis mengenai perkembangan politik daerah serta opini publik di Langkat dan Sumatera Utara, bertahannya dukungan besar terhadap Partai Golkar tidak bisa diterangkan hanya dengan mengandalkan keberhasilan pendidikan politik formal yang bersifat teoritis. Sebaliknya, Seperti yang dijelaskan dalam artikel (Ihsan, 2025) hal ini merupakan hasil dari perpaduan strategis antara pendekatan pendidikan politik non-formal yang bersifat membujuk dan penguatan jaringan partai hingga ke lapisan terbawah masyarakat. Dalam konteks ini, warga menilai bahwa upaya pendidikan politik yang dilakukan partai melebur secara alami dengan berbagai kegiatan sosial yang menjawab kebutuhan nyata mereka seperti pemberian bantuan sembako, layanan kesehatan gratis, serta dialog langsung saat masa reses yang membangun persepsi bahwa partai hadir sebagai pemecah persoalan sehari-hari, bukan entitas politik yang

jauh dari realitas. Di samping itu, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting,dkk.,2025) penguatan struktur melalui kader dan tokoh lokal yang dipercaya masyarakat, seperti ketua partai yang merangkap sebagai wakil bupati atau kader desa yang aktif menjalin silaturahmi, menciptakan pemahaman langsung bahwa partai dan pemerintahan bergerak seirama serta memiliki perhatian nyata. Akibatnya, proses penyerapan nilai-nilai partai justru lahir melalui hubungan sosial yang berkelanjutan, pengalaman bersama, serta ikatan batin yang terbentuk dari interaksi intensif di ruang-ruang non-formal masyarakat bukan dari pemahaman ideologis yang diajarkan lewat pendidikan formal.

Di Kabupaten Langkat, Partai Golkar memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan dan terfokus pada pengkaderan mulai dari pembekalan di level kecamatan berdampak langsung pada peningkatan suara. Para kader yang mengikuti proses pendidikan/pembinaan ini mendapat kepercayaan publik, terbukti dengan keberhasilan mereka memenangkan kontestasi elektoral dan menduduki kursi legislatif tertinggi sebagai perwakilan rakyat. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa penanaman modal partai pada pengembangan SDM melalui pendidikan politik memberi kontribusi signifikan terhadap daya tarik elektoral Partai Golkar Di Kabupaten Langkat.

Melalui gambaran diatas, untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan politik kader sudah seharusnya pendidikan politik dilakukan oleh partai politik. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Politik Partai Golkar Di Kabupaten Langkat Dalam Pencetak Kader Partai”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik partai golkar di kabupaten Langkat Sumatera Utara?
2. Apa saja tantangan dan peluang yang telah dilalui Partai Golkar dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Langkat?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan atau menganalisis cara yang dilakukan oleh partai Golkar dalam melaksanakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui atau menganalisis tentang hal apa yang menjadi tantangan dan peluang partai Golkar dalam rangka membangun pendidikan politik Kabupaten Langkat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan cara yang dilakukan oleh partai Golkar dalam rangka melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui tentang hal apa saja yang menjadi tantangan dan peluang partai Golkar dalam rangka membangun pendidikan politik di Kabupaten Langkat.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang “Pendidikan Politik Partai Golkar

Di Kabupaten Langkat Dalam Mencetak Kader Partai”, serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi disiplin Ilmu Politik dalam rangka melihat kebijakan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kader.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti. Peneliti juga berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada kader yang ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara.